

**ANALISIS MANAJEMEN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



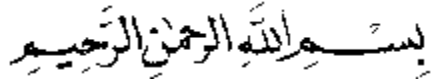
Oleh

TANTI PRASTUTI

E 121 10 102

**JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR



Begitu besar nikmat ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada manusia, sehingga tak akan pernah cukup masa hidup kita untuk mempelajari keajaiban ilmu-ilmu tersebut.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji syukur atas rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur*” dapat diselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Hamka Naping, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.

2. Bapak **Dr. H. A. Gau Kadir, MA**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
3. Bapak **Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si** selaku *Pembimbing I*, dan bapak **Rahmatullah, S.IP,M.Si** selaku *Pembimbing II* yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. **Drs. A. M. Rusli, M.Si ,Dra. Hj. Nurlina, M.Si, dan Dr. H.A. Gau Kadir, MA** selaku penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri sidang proposal dan skripsi dari penulis dan atas segala masukannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar/dosen-dosen yang telah membagikan ilmunya, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah di sisi-Nya, dan juga seluruh staf pegawai di lingkup FISIP Universitas Hasanuddin.
6. Teruntuk orang tua penulis Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kalian. Ayahanda Tasdin Sente serta ibunda Mas'amah tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat rezeky dan kesehatan serta ridho-Nya kepada keduanya yang telah menjadi orang tua terhebat dan terbaik bagi anak-anaknya .

7. Untuk adik-adik penulis Andrikiawan , Aditya ,dan Azzifah terima kasih semangat dan masukannya .dan Tetap semangat dan berdoa untuk bisa bahagiakan orang tua.Sukses buat kita semua.
8. Segenap keluarga Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (**HIMAPEM FISIP UNHAS**),. terima kasih atas pengalaman berbagi pengetahuan selama ini.
9. Teman-teman VG dan dalam 4 tahun terakhir ini menjadi saudara , terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai kesuksesan. Apa yang terjadi selama ini akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.Solid bukan berarti harus selalu bersama,Solid itu kita masih saling mengingat dan mendukung dengan pilihan kita masing-masing.
10. Teman-teman baru yang akhirnya bisa saling berbagi selama 49 hari ,KKN gelombang 85 posko limbong : Masbin Dahlan ,S.T (allank titttttt) akhirnya sarjana , Muh.Mahfud Makkulau ,C.S.P (afudd) masih calon ,selamat berjuang! ,Amanah Utami Nasrun ,S.E (tamcan) ngebaruga bareng :) ,Rahma,C.S.P (karaeng galesong) ,semangat kejar target bulan 9 .see you on top guys ,limbong 49 days!

11. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amin.

Akhir Kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Makassar ,9 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	..viii
DAFTAR TABEL.....	.x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAKSI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Konsep manajemen.....	10
2.2. Tinjauan Tentang DPPKAD.....	16
2.3. Tinjauan Tentang Optimalisasi.....	16

2.4. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah.....	18
2.5. Tinjauan Tentang PAD.....	19
2.6. Tinjauan Tentang Pengelolaan PAD.....	21
2.7. Kerangka Konsep.....	25
2.8. Skema Kerangka Konsep.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2. Tipe Penelitian.....	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4. Informan Penelitian.....	30
3.5. Analisis Data.....	31
3.6. Definisi Operasional.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1. Kondisi Geografis.....	34
4.1.2. Kondisi Demografis.....	36
4.1.3. Gambaran Umum DPPKAD Luwu Timur.....	48
4.2. Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi PAD Kab.Luwu Timur.....	57
4.2.1 Perencanaan Target PAD	60
4.2.2. Pelaksanaan Pemungutan PAD	73

4.2.3. Pengawasan Atas Penatausahaan PAD.....	79
4.2.4. Evaluasi Realisasi PAD	82
4.3. Sinergitas Hubungan DPPKAD dengan SKPD lain	85
4.4. Target dan Realisasi PAD Tahun 2010 2011 2012	88
4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan PAD.....	99
4.5.1. Faktor-Faktor Pendukung.....	99
4.5.2. Faktor-Faktor Penghambat.....	102

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Skema Kerangka Konsep	27
4.1	Kurva target dan Realisasi PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010,2011,2012	96
4.2	Kurva realisasi Penerimaan PAD Tahun 2010,2011,2012	97

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1 Target dan realisasi PAD Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2010,2011,2012	4
4.1 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin	36
4.2 Kepadatan penduduk menurut kecamatan	37
4.3 Rumusan Kebijakan DPPKAD	53
4.4 Jumlah pegawai berdasarkan golongan	56
4.5 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	56
4.6 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	56
4.7 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian	57
4.8 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	57
4.9 Persentase target dan realisasi PAD kabupaten Luwu Timur	58
4.10 Target dan realisasi PAD tahun Anggaran 2010	88
4.11 Target dan realisasi PAD tahun Anggaran 2011	90
4.12 Target dan realisasi PAD tahun Anggaran 2012	92

Ringkasan

Tanti Prastuti ,Nomok Pokok E 121 10 102, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ,Dengan judul Skripsi “ **Analisis Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi PAD di Kabupaten Luwu Timur**” , dibawah bimbingan oleh **Rasyid Thaha dan Rahmatullah** .

Implikasi Pelaksanaan Desentralisasi fiskal adalah daerah mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah ,termasuk penerimaan yaitu pendapatan asli daerah.pemerintahan daerah melalui DPPKAD diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan daerah agar mendorong terciptanya pembangunan ekonomi daerah .maka dari itu DPPKAD sebagai SKPD yang mengurus keuangan daerah bisa memenage tugasnya dengan baik dan harus mengetahui kondisi ,potensi daerahnya sendiri .

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang manajemen DPPKAD kabupaten luwu timur dalam mengelola PAD secara optimal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya .adapun fokus dari manajemen dalam penelitian ini adalah *Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan PAD, Pengawasan atas Penatausahaan PAD, Evaluasi Realisasi PAD*.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini dan studi kepustakaan serta ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh selama penelitian yang berhubungan langsung dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen DPPKAD dalam mengoptimalkan PAD sudah cukup baik .namun,ada beberapa hal yang mesti lebih ditingkatkan dan diperhatikan untuk memperoleh PAD yang maksimal termasuk kendala-kendala yang dihadapi .Adapun faktor-faktor penghambat DPPKAD dalam mengelola PAD berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yaitu Masih kurangnya partisipasi masyarakat , SDM yang belum memadai ,dan Pertanggungjawaban para SKPD pengelola PAD masih kurang maksimal .

Kata Kunci: Manajemen,PAD,Optimalisasi

ABSTRACT

Tanti Prastuti, Nomor Pokok E12110102 , Government Science Department of Political Government Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Thesis Titled "An Analysis Management DPPKAD in Optimizing PAD in East Luwu", under direction of Rasyid Thaha and Rahmatullah.

Implications of Fiscal Decentralization is the area gets more flexibility in the manage local finance, including income are local own revenue. local government through DPPKAD manage and optimize regional income to encourage the creation of regional economic development. Therefore DPPKAD as on education finance in charge of the area can managing good job and should know the conditions, the potential of their own region. The research aims to describe the management DPPKAD east luwu district optimally manage the local own revenue (PAD) and the factors that influence it. While the focus of this research is the management are Planning targets local own revenue (PAD), Implementation of Voting PAD, supervision over the administration of PAD, Evaluation Realization of local own revenue (PAD). Research type used is descriptive Data was collected by observation techniques, the research done by direct observation of the object under study and interviews in which the researcher to conduct a discussion with some informants directly related to the discussion of this study and the study of literature and supported by secondary data obtained during research directly related to this research topic. The results of this research indicate that DPPKAD in optimizing the management of PAD is good enough. However, there are some things that must be improved and taken to obtain maximum revenue, including obstacles encountered. Meanwhile DPPKAD inhibiting factors in managing PAD based on the results of research and analysis the author There is a lack of community participation, inadequate human resources, and Accountability of the managers of the PAD is still less than the maximum.

Keywords: management, PAD, Optimalizing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memasuki era baru tata pemerintahan sejak tahun 2001 yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan ini disertai dengan peraturan perundang-undangan yang terus diperbaharui agar menciptakan otonomi daerah yang lebih baik. Dewasa ini pun otonomi daerah didasarkan atas UU No.12 Tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Serta dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah. UU No.12 Tahun 2004 Berintikan Pembagian kewenangan dan fungsi (Power Sharing) sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur Pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial Sharing).

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah .lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.dalam penelitian ini,fokus pembahasan akan dipusatkan pada manajemen penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah .

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas :

- a. Hasil pajak daerah ;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dewasa ini salah satunya adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. Upaya Peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan

PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah .

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2010,2011,2012**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2010	Rp.49.954.002.000,00	Rp.59.148.342.602,28
2.	2011	Rp.61.212.444.807,00	Rp.64.107.042.644,16
3.	2012	Rp.100.425.012.948,00	Rp.98.100.075.156,43

Sumber : DPPKAD luwu timur

Dalam konteks Kabupaten luwu timur yang memiliki cukup banyak kekayaan sumber daya alam.berkaitan dengan hal tersebut PAD kabupaten luwu timur dalam tiga terakhir ini terus mengalami peningkatan yakni lihat tabel 1.1, tahun Anggaran 2010 realisasi PAD sebesar Rp.59,148 M dan sekitar 12,80% kontribusinya terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2010 yakni sebesar Rp 461.849.482.490,00 ,Tahun Anggaran 2011 Realisasi PAD sebesar Rp.64,107 M sekitar 10,95% kontribusinya terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2011 yakni sebesar Rp 585.110.129.676,00 ,Tahun Anggaran 2012 Realisasi PAD sebesar Rp.98,100 M sekitar 13.96% ,kontribusinya terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2012 yakni sebesar Rp 702.684.396.276,00.terlihat bahwa PAD kabupaten luwu timur terus meningkat namun,ternyata hasil yang terus meningkat ini tidak sesuai target

yang di tentukan pada saat penetapan anggaran .seperti yang terjadi pada tahun 2012 target yang ditetapkan yakni sebesar Rp.103,92 M terjadi anggaran perubahan menjadi Rp.100.425.012.948,00 .namun tetap yang tercapai hanya sebesar Rp.98,100 M .kecenderungan masih jauh dari target juga terjadi pada tahun 2013 ini pada evaluasi triwulan pada minggu ke empat bulan juli 2013 ditargetkan PAD sudah mencapai 60% namun, baru mencapai 37.92% dari target PAD tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 145, 128 M hal ini disebabkan oleh minimnya realisasi dari para SKPD yang memiliki tugas dalam memungut PAD.ini menandakan bahwa di butuhnya manajemen yang baik oleh pemerintah dalam hal ini DPPKAD yang memiliki tugas pokok untuk mengelolaa keuangan daerah agar apa yang ditargetkan dapat tercapai.

Kabupaten luwu timur merupakan daerah yang menyimpan kekayaan alam di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Kabupaten Luwu Timur didukung letak geografis yang sangat strategis karena menghubungkan Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara, menjadikan daerah ini jalur perlintasan guna memainkan peran percontohan pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro.

Disektor pertambangan Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan Nikel yang cukup banyak. Penambangan Nikel di kabupaten ini dilakukan oleh PT INCO (PT.Vale) yang terletak di Kecamatan Nuha. Pada tahun 2010, jumlah produksi Nikel Matte mencapai 77.185,184 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.228,332 ton. disektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Luwu Timur memiliki lahan sawah seluas 20.017 Ha, dan Perkebunan meliputi perkebunan kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, dan kakao. Pada tahun 2010, produksi tanaman perkebunan rakyat terbanyak adalah kelapa sawit, yaitu sebesar 47.155,53 ton yang diperoleh dari lahan seluas 5.114 Ha, yang kedua adalah komoditas kakao, yakni sebesar 16.938,86 ton dari lahan seluas 37.315,05 Ha. Produksi kelapa sawit terbanyak berada di kecamatan Mangkutana yaitu sebesar 14.418 ton dengan luas lahan 1.291 Ha. Sedangkan produksi kakao terbesar berada di kecamatan Burau sebesar 3.646,50 ton dengan luas lahan 7.791,15 Ha. dan sektor selanjutnya yaitu pariwisata ,banyaknya tempat wisata di daerah luwu timur bisa menjadi sumber pendapatan daerah . Danau Mahalona, Matano & Towuti (Sistem Danau Malili) telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Wisata Alam yang ditetapkan tahun 1970. Di bawah pengelolaan Balai KOnservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, kawasan ini memiliki luas keseluruhan 95.000 Ha, meliputi pulau - pulau di

dalam danau. Dengan keunikan sebagai danau tektonik, kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata tirta yang dipadukan dengan wisata minat khusus, seperti menyelam dan mendayung.

Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek PAD. Misalnya, di sektor pertambangan dan perkebunan yang cukup mendominasi di Kabupaten luwu timur, para pengusaha pertambangan dan perkebunan untuk melaksanakan usahanya pasti mengurus Surat Izin Usaha dan dokumen-dokumen lain yang dikenakan pajak maupun retribusi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah .berkaitan dengan hal tersebut, N.Ladjin,(2008) mengemukakan:

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan berarti daerah Harus berlomba-lomba membuat pajak baru tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Melihat potensi kekayaan SDA Kabupaten luwu timur, DPPKAD sebagai salah satu SKPD, berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peran DPPKAD dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap

tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, juga untuk menekan defisit APBD dalam setiap tahun anggaran.

Terkait dengan itu, DPPKAD dituntut profesional kompeten dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing . Dalam hal strategi , apakah kabupaten luwu timur sudah mengelolah secara optimal sumber-sumber PAD yang ada? Apakah Pemerintah Kabupaten luwu timur melalui DPPKAD telah melakukan intensifikasi terhadap seluruh sumber penerimaan daerah melalui PAD ,dan telah melakukan koordinasi yang baik dengan para pengelola PAD lainnya. Maka dari itu, kemudian penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Luwu Timur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan PAD di Kabupaten luwu timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi PAD Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi PAD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk mengetahui Manajemen DPPKAD dalam optimalisasi pendapatan asli daerah di kabupaten luwu timur.
 - b. Sebagai bahan studi pustaka di almamater peneliti yakni di Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian praksis bagi DPPKAD Kabupaten Luwu Timur untuk mengevaluasi kinerjanya .
 - b. Sebagai bahan kajian praksis bagi DPPKAD Kabupaten Luwu timur untuk merumuskan desain strategi dalam upaya optimalisasi PAD Kabupaten luwu timur ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan teoritis. Bagian ini berisi deskripsi singkat tentang landasan teori yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian, kerangka konsep dan skema kerangka konsep sesuai dengan desain penelitian.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Manajemen

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan apa pun manajemen sangatlah diperlukan untuk seluruh sumber daya organisasi demi terwujudnya cita-cita atau misi organisasi yang bersangkutan. Demikian halnya dalam pengelolaan PAD. Manajemen sangat penting untuk memaksimalkan pengelolaan PAD. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni “manage” yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan lain sebagainya. Kegiatan manajerial yang baik adalah prasyarat dalam pengelolaan PAD yang baik. Manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses pengaturan seluruh sumber daya dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa definisi/pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para pakar manajemen.

“Manajemen adalah kemampuan dan ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain” P.Siagian (ulber silalahi,2011).

Menurut Terry Sebagaimana dikutip Manulang ,Fungsi pokok manajemen terdiri dari planning,organizing,actuating,and controlling yang sering disingkat POAC.Masing-masing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya.

“Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari atas perencanaan,pengorganisasian,penggerakan,pelaksanaan,pengawasan dan pemanfaatan baik ilmu seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”(M.Manulang,2002).

Demikian halnya dengan S. Kimball dan D.S Kimball Jr yang mengemukakan bahwa:

“Manajemen terdiri dari semua tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan sebuah perusahaan, pembiayaan, penetapan garis-garis besar kebijaksanaan, penyediaan semua peralatan yang diperlukan dan penyusunan kerangka organisasi serta pemilihan pejabat terasnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian/definisi di atas,penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya para ahli dalam memberikan definisi/pengertian tidak terlepas dari beberapa hal yang sangat penting dalam manajemen yaitu:

1. Adanya wadah dan alat pencapaian tujuan
2. Adanya proses/fungsi tertentu termasuk kerjasama dalam mencapai tujuan
3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai.

Inti dari pembahasan tentang manajemen adalah pembahasan tentang beberapa fungsi fundamental yang harus dilaksanakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang apa yang mesti dilakukan demi tercapainya tujuan bersama. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen.

Menurut Luther Gulk dalam Sutopo fungsi manajemen mencakup “POSDCRB” yaitu:

1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penyusunan pegawai (staffing)
4. Pemberian bimbingan (directing) Pengkoordinasian (coordinating)
5. Pelaporan (reporting)
6. Penganggaran (budgeting)

Selanjutnya George R. Terry dalam Sutopo memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fungsi manajemen yang dikenal dengan “POAC” yaitu:

1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penggerakan (actuating)
4. Pengawasan (controlling)

Dari beberapa rumusan tersebut oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya rumusan tersebut hanya berkisar pada empat fungsi sebagaimana yang dirumuskan oleh George R. Terry. Berikut ini penjelasan ke empat fungsi tersebut.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya.

Sondang P. Siagian, menjelaskan bahwa:

“Perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses perumusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya.

b. Pengorganisasian (Organizing)

S. P. Siagian mengemukakan bahwa:

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Setelah perencanaan dilakukan, maka fungsi selanjutnya adalah pengorganisasian. Dari definisi diatas pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan

administratif. Tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tatanan dan fungsi berikutnya .

c. Penggerakan (Actuating)

Menurut George R. Terry dalam ulber silalahi yang dimaksud dengan penggerakan adalah :

“Tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.”

Penggerakkan atau pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara/strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk menghindari agar bawahan tidak melaksanakan tugasnya di bawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh tanggungjawab.

d. Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan sangat penting tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Karena pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan , tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Stephen Robein (Inu kencana syafiie,2011:109) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai:

“Proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan,dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya,dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan”.

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa apa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, penempatan orang-orangnya sudah tepat (*the right men in the right place*) dan waktunya sudah sesuai. Jika belum maka akan diadakan perbaikan agar tujuan dapat tercapai.Pengawasan tidak hanya datang dari manajer tetapi diharapkan muncul dari semua *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan tersebut ,utamanya masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional.

Kegiatan manajemen berupa pengawasan merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana,mengukur hasil dibandingkan dengan target dan rencana,melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun *feed-back* demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.Fungsi dari sebuah pengawasan yang baik adalah berupa hasil atau masukan yang kritis dan konstruktif ,apa adanya dan objektif .Hasil dari pengawasan yang diperoleh yang kemudian akan digunakan sebagai bahan oleh pihak manajemen dalam hal ini pengambil keputusan untuk perumusan dan perencanaan kegiatan berikutnya,seperti sebuah siklus yang terus berputar.

2.2. Tinjauan tentang DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Manajemen DPPKAD kabupaten luwu timur disini adalah segala tindakan DPPKAD baik dalam bentuk kebijakan strategis, kebijakan teknis ataupun peran dalam bentuk kerja sama dengan institusi lain/SKPD pengelola PAD, yang terkait dengan pengelolaan PAD.dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai .

2.3. Tinjauan tentang Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Apabila dikaitkan dengan pengertian strategi , maka strategi optimalisasi pendapatan asli daerah berarti segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber daya daerah

yang sah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam konteks strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak dan retribusi daerah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan bagian yang penting dalam suatu strategi sebagai kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah yang diwenangkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (dalam Wahab, 2001:59) mengungkapkan bahwa :

“The execution of policies is a important if not more important than policy marking. Policies will remain dream or blue prints jackets unless they are implemented” (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip jika tidak diimplementasikan).

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tidak hanya menyangkut strategi yang disusun saja melainkan melibatkan sumber daya sebagai pelaksana yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan, hasil dan dampak yang saling diinginkan. Pelaksana sebagai aspek yang penting yang harus ada dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari individu, kelompok, ataupun organisasi yang mempunyai kapasitas tertentu. Keberadaan pelaksana tidak akan memiliki apa-apa jika tidak didukung oleh kemampuan yang dimilikinya. Edwards (1980:63) menyatakan bahwa “ *Implementors need*

to know what to do when they are given directive to act” (Pelaksana harus mengetahui berbuat apa ketika diberi petunjuk untuk bertindak).

2.4. Tinjauan tentang Keuangan Daerah

“Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: ”semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku ” (Mamaseh, 1995).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Semua hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Sedangkan semua kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan PAD.

2.5. Tinjauan tentang PAD

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Berkaitan dengan terselenggaranya otonomi daerah, salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah adalah bidang keuangan. Keuangan ini merupakan salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena keuangan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adapun salah satu yang menjadi sumber keuangan tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Widjaja (1992:42) adalah :

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga sebagai usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)".

Sedangkan menurut Yani (2002:39) diartikan sebagai:

"Penerimaan yang diperoleh daerah sebagai sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu :

"Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2.6. Tinjauan tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah perlu diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dibutuhkan kecerdasan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan itu mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). SDM berkaitan erat dengan pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan. Sedangkan SDA mencakup segala kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah. Dalam hubungannya dengan peningkatan PAD, kehandalan SDM dan kekayaan SDA suatu daerah sangat diperlukan. SDA yang didukung dengan SDM yang memadai untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah akan melahirkan daerah dengan PAD yang baik.

Merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan

pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Artinya, PAD adalah pendapatan tetap pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan dalam peraturan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sehubungan dengan itu, kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan negara perlu disinkronkan karena saling berhubungan erat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu diperlukan perencanaan. Perencanaan PAD perlu dilakukan dengan penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang, cepat dan tepat serta mempermudah tercapainya tujuan, dengan tetap memperhitungkan risikonya.

Pada dasarnya, setiap pemerintah daerah selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaharui manajemen pengelolaan PAD mengingat PAD adalah cerminan pendapatan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah akan dianggap gagal jika hanya mengandalkan bantuan

keuangan dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya rumusan strategi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus lebih cerdas mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi meningkatkan PAD. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukkan di kas daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota adalah pajak yang kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan pajak Parkir.

Selain itu, kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang sebesar-besarnya kepada daerah untuk meningkatkan PAD. Ada pajak-pajak baru yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada daerah kabupaten sebagai sumber penerimaan PAD bagi pemerintah daerah. Pajak-pajak

baru yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat itu terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

b. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, penerimaan pemerintah daerah yang diperuntukkan dalam peyelenggaraan urusan pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Namun, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan daerah dalam bentuk retribusi digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum terdiri dari 14 jenis retribusi, retribusi jasa usaha 11 jenis dan retribusi perizinan tertentu ada 4 jenis yaitu izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan (HO), izin trayek dan izin usaha perikanan.

Jelas bahwa jenis pajak daerah dibatasi. Sedangkan untuk retribusi daerah masih dimungkinkan jenis lain apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP). Khususnya retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pasal 150 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi selain yang

ditetapkan itu masih memungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi lain sepanjang memenuhi kriteria.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah penerimaan pendapatan yang berasal dari laba BUMD dan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jika dirinci menurut objek pendapatan mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.7. Kerangka Konsep

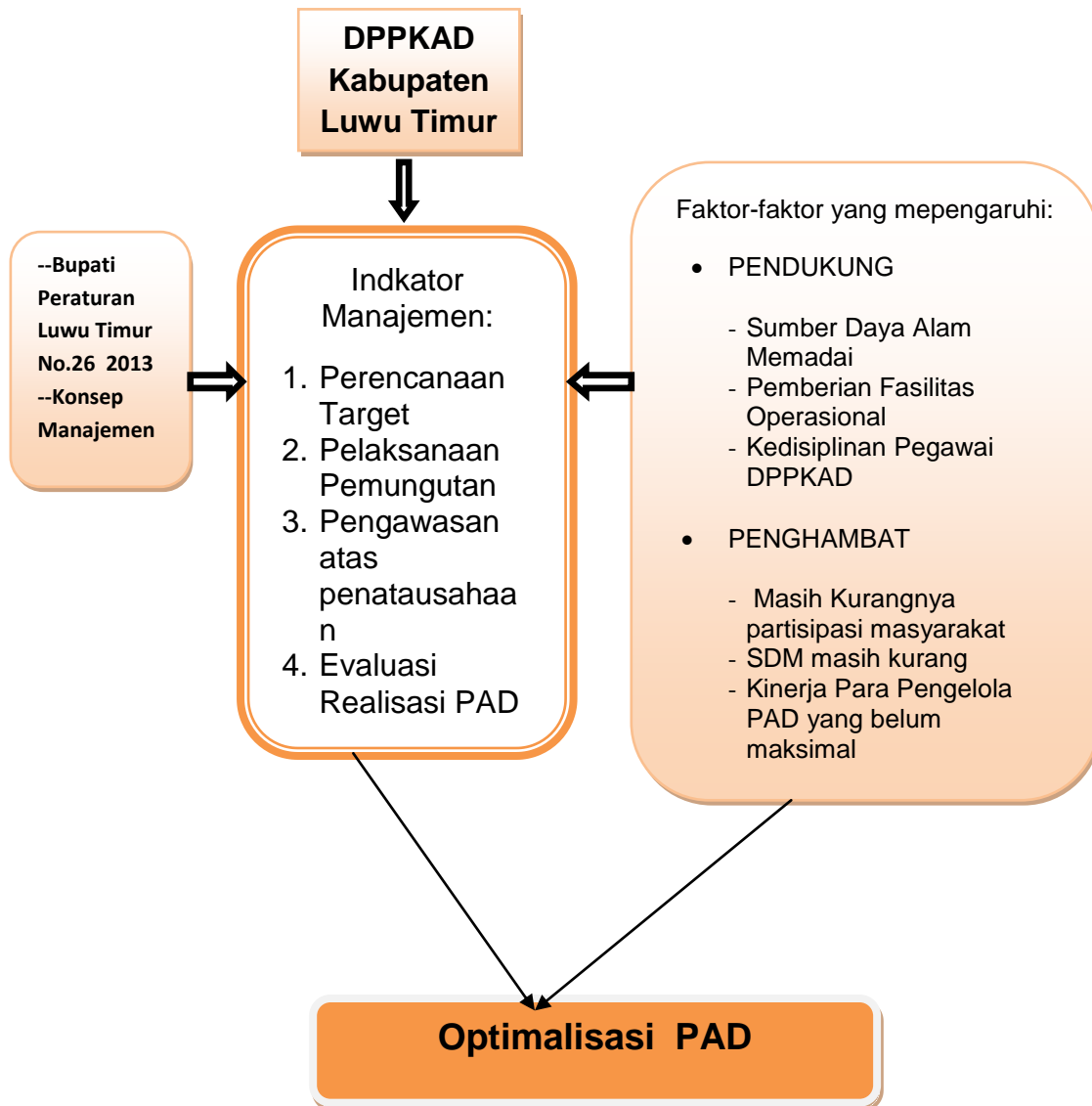
Kabupaten Luwu timur terbentuk berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Konsekuensi Terbentuknya daerah otonom yakni, pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah dari pemerintah pusat, salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten Luwu Timur adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut ,maka dibentuklah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timurberdasarkan PERDA kabupaten Luwu Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten luwu timur,jadi dalam hal ini DPPKAD memiliki tugas dan fungsi dalam hal manajemen (pengelolaan) Pengelolaan PAD.

Prinsip-Prinsip Manajemen DPPKAD berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal.Manajemen adalah semua yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban dan pengawasan .DPPKAD sebagai SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan PAD.DPPKAD sangat berperan dalam Pengelolaan PAD sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsinya sesuai aturan yang berlaku,sehingga Sumber-sumber PAD dapat dimanfaatkan secara baik dan juga hubungan-hubungan dengan SKPD yang berkaitan dengan PAD dapat terlaksana secara optimal.adapun standar optimal dalam penelitian ini yakni 90-100 % ini menandakan realisasi PAD sesuai target dan atau melebihi 10% kontribusi terhadap pendapatan pada APBD.

2.8. Skema Kerangka Konsep

Analisis Manajemen DPPKAD dalam Optimalisasi PAD kabupaten Luwu Timur.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi selatan, adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 26 desember 2013 – 25 januari 2014.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan manajemen DPPKAD dalam optimalisasi PAD di kabupaten luwu timur, dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang berupa wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang faktual dan akurat mengenai objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang

bersumber dari kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data dari studi lapang diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

3.3.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel birokrasi pemerintahan, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan ini merupakan data sekunder

3.3.2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan yang dimaksudkan mencari data primer untuk objek penulisan, sekaligus mencari bahan pendekatan terhadap prakteknya. Sehubungan dengan pengumpulan data secara *Field Research* tersebut, maka digunakan teknik penyusunan antara lain :

- Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan.
- Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan informan yang berkompeten terhadap tujuan penelitian.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary informan). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi/data tentang objek penelitian guna memperkaya analisis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penelitian, penulis menemukan bahwa tidak semua bidang dalam DPPKAD memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD, masing-masing bidang dalam menjalankan perannya dibatasi dengan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan, hanya ada satu bidang yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan PAD, yakni Bidang Pendapatan. Maka dari itu, penulis mewawancarai secara mendalam pegawai/staf dalam bidang pendapatan. Namun demikian, untuk memperkaya analisis, Penulis tetap akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang kapabel menyangkut pembahasan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:.

- Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD kabupaten Luwu Timur.
- Kepala sub bagian Perencanaan kabupaten Luwu Timur

- Kepala seksi Pendataan Objek pajak dan Retribusi daerah
- Kepala seksi Penetapan Pajak dan retribusi daerah
- Staf Bidang Pendapatan

3.5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Jadi pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul tetapi juga dilakukan ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung. Bentuk analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

3.6. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

3.6.1. Manajemen

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah manajemen DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya. Manajemen itu digambarkan dalam empat indikator dalam hal pengelolaan PAD, yaitu:

✓ **Perencanaan Target**

Ada tiga tahap yang harus diketahui dan diperhatikan oleh DPPKAD dalam hal perencanaan target dalam penelitian ini yaitu : Mengetahui Sumber-sumber dan Potensi PAD ,Dasar Hukum dan Sasaran kebijakan.

✓ **Pelaksanaan Pemungutan**

Pelaksanaan Pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemungutan PAD oleh DPPKAD,UPTD kecamatan dan 10 SKPD-SKPD lain pengelola PAD .

✓ **Pengawasan Atas Penatausahaan**

Pelaksanaan pengawasan dalam penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD dengan melihat hasil laporan yang dibuat yang merupakan kumpulan data dari semua pengelola PAD.

✓ **Evaluasi Realisasi**

Tahap evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah target yang ditentukan sudah mencapai target atau belum.dan dua hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu rapat evaluasi tri wulan yang dihadiri para pengelola PAD dan monitoring terhadap masalah yang ditemukan pada rapat evaluasi tri wulan.

3.6.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini dibatasi pada sektor tertentu yang besar kontribusinya dalam penerimaan PAD Kabupaten Luwu Timur.

3.6.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen DPPKAD

Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan PAD Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

4.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada disebelah selatan garis katulistiwa, tepatnya terletak diantara 2o03'00" - 3o03'25" LS dan 119o28'56" - 121o47'27" BT. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, memiliki luas wilayah 6.994,88 km² atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan 107 desa. Kabupaten Luwu Timur berada pada ketinggian 0 - 1.230 m diatas permukaan laut dengan struktur wilayah terdiri atas dataran rendah, tinggi dan wilayah pesisir. Kondisi topografi dan kelerengn berada pada kisaran 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 30%, 30 – 40% dan > 40%.

Kabupaten Luwu Timur sebagaimana daerah tropis lainnya, mempunyai suhu berkisar antara 22,5oC – 33,6oC, termasuk dalam tipe iklim A (Schmidt – Ferguson), dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2008 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 251 mm dengan rata-rata jumlah hujan perbulan mencapai 19 hari.

Keunikan lainnya adalah di Kabupaten Luwu Timur terdapat lima danau, empat diantaranya terletak di Kecamatan Towuti yakni Mahalona dengan luas mencapai (25 km²), Towuti (585 km²), Tapparang Masapi (2,43 km²), dan Lontoa (1,72 km²) dan satu terletak di Kecamatan Nuha yakni danau Matano. Danau Matano memiliki luas 245,7 km², dengan kedalaman mencapai 600 m (1.969 kaki), 382 meter di antaranya berada di atas permukaan laut. Danau ini tercatat sebagai danau terdalam di **Asia Tenggara** dan **terdalam kedelapan di dunia**. Disamping keunikan dan panorama alam yang indah, Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, sehingga sangat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi pada masa datang, khususnya pengembangan ke arah industri berbasis sumberdaya alam, yang meliputi; sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata, energi dan sumberdaya mineral.

4.1.2 Kondisi Demografis

4.1.2.1. Kependudukan

Penduduk merupakan aspek penting dalam berbagai indikator pembangunan karena selain sebagai subjek juga sebagai objek dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan umur dan peran masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di bidang kependudukan, BPS Luwu Timur melansir hasil pendataan survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS), laju pertumbuhan 1.01 persen pertahunnya. adapun jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 4.1.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis kelamin

Kecamatan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
Burau	17242	16808	34050
Wotu	14922	15030	29952
Tomoni	11957	11406	23363
Tomoni Timur	6415	6184	12599
Angkona	12717	12095	24812
Malili	19706	17950	37656
Towoti	16686	14739	31425
Nuha	12447	10982	23429
wasuponda	10817	9464	20281
Mangkutana	10632	10427	21059
Kalena	5549	5559	11108
Jumlah	139090	130644	269734

Sumber : bps Kab.Luwu Timur

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

NO.	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1.	Burau	256,23	24050
2.	Wotu	130,52	29952
3.	Tomoni	230,09	23363
4.	tomoni Timur	43,91	12599
5.	Angkona	147,24	24812
6.	Malili	921,2	37656
7.	Towoti	1820,48	31425
8.	Nuha	808,27	23429
9.	Wasuponda	1244	20281
10.	Mangkutana	1300,96	21059
11.	Kalaena	41,98	11108
Jumlah		6944,88	269734

Sumber : bps Kab.Luwu Timur

Kepadadatan penduduk di Luwu Timur masih relatif kecil dengan rata-rata di setiap kilometer persegi wilayahnya terdapat 35 jiwa penduduk. Rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur tahun 2011 sebesar 62,22 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 62 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

4.1.2.2. Transmigrasi

Kabupaten Luwu Tiimur merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi di provinsi Sulawesi Selatan. Ada tiga UPT di kabuopaten Luwu Timur diantaranya adalah UPT malili SP I, UPT Malili SP II dan UPT Mahalona. Para transmigran yang ada di tiga UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB/Bali, Ambon, Poso, Luwu Utara/Timur, maupun Timor-Timur. Ketiga UPT tersebut ditempati oleh 970 KK atau 4.661 jiwa.

4.1.2.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya pembangunan jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus berubah sesuai dengan keadaan demografi. pada tahun 2011 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) turun 7,52 persen dibandingkan tahun 2010. Begitupula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengalami penurunan 6,06 persen dari tahun lalu. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih lambat daripada penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sementara persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja meningkat. Dari total penduduk usia kerja, sekitar 68,33 persen di antaranya termasuk dalam angkatan kerja. Sisanya 31,67 persen merupakan penduduk yang tergolong sebagai bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang sekolah,

mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan, BPS menyebutkan pencapaiannya terkait erat dengan fasilitas pendidikan yang ada.

Tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja sedangkan tingkat penganggur merupakan perbandingan jumlah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja dengan angkatan kerja. Di Kabupaten Luwu Timur tingkat kesempatan kerja mencapai 89,04 persen sedangkan tingkat pengangguran mencapai 10,96 persen.

4.1.2.4. Pendidikan

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU.

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya. Sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian di dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk meningkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan.

Pasalnya, pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat pada akses penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar (guru/produsen), kelengkapan literature (buku-buku) dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Hanya saja, segala bentuk upaya peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendali. Sarana pendidikan seperti bangunan fisik (gedung sekolah) yang ideal tentunya merupakan dambaan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmatinya.

Mengenai pelayanan pendidikan, pemerintah kabupaten Luwu Timur telah menerapkan pendidikan gratis sejak tahun 2006. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi rendahnya mutu anak didik yang diukur dengan tingkat kelulusan. Kendati pendidikan gratis telah dimulai sejak 2006, nyatanya tingkat kelulusan Lutim diurutan 22 dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Awalnya, program pelayanan Gratis SD sampai SMU di Lutim tidak menunjukkan hasil berbanding lurus dengan tingkat kelulusan siswa.

Program pelayanan pendidikan diperbaiki dengan tiga strategi pendidikan, yaitu peningkatan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, dan peningkatan pencitraan publik.

Pertama, Lutim telah berhasil membangun unit sekolah baru (USB) sejak 2004 hingga 2007 di berbagai tingkatan diantaranya SMP delapan unit, SMA tujuh unit, dan SMK dua unit. Selain itu, juga dibangun USB SD dan SMP satu atap lima unit serta membuka SMP terbuka dua unit. USB ini dilengkapi fasilitas laboratorium, perpustakaan, laboratorium bahasa, pusat sumber belajar dan pembelajaran TIK (kurikulum) bagi guru-guru.

Kedua, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, Lutim memprioritaskan pada peningkatan tingkat kelulusan siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Upaya yang dilakukan mencapai target dengan melakukan kerjasama dengan UNM dan YPS PT. Inco berupa pembekalan dan pencerahan kepada guru-guru mata pelajaran Ujian Negara (UN), melakukan try out ke sekolah-sekolah khususnya siswa pra ujian nasional (UN) berupa simulasi soal-soal UN yang diakan 3 sampai 4 kali lengkap dengan kisi-kisinya.

Upaya ini membuahkan hasil. Tahun 2008 Lutim berada di urutan delapan tingkat SMA sederajat, urutan lima tingkat SMP sederajat dan 2009 meningkat lagi menjadi urutan tiga tingkat SMA sederajat dan urutan dua tingkat SMP sederajat. Upaya lain yang ditempuh yaitu memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan meningkatkan jenjang pendidikan

guru-guru ke tingkat S1 dan S2 melalui bekerjasama dengan Fakultas MIPA Unhas.

Strategi ketiga, peningkatan pencitraan publik dengan menerbitkan perda No. 8 Tahun 2009 tentang pendidikan gratis sebagai sarana peyakinan publik terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Luwu Timur(Fajar news, 2010).

Kucuran dana untuk pendidikan dari 24% APBD meningkat dari tahun ke tahun, Pada 2006 sebesar Rp79 miliar, 2007 sebesar Rp116,7 miliar, 2008 sebesar Rp161,4 miliar, dan 2009 sebesar Rp182.7 miliar. Tidak mengherankan jika Lutim mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah pusat maupun propinsi. Juga dari kalangan CSO, Fipo award 2011 atas komitmennya memajukan daerah.

Dalam hal penyediaan prasaran pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) telah tersedia 171 sekolah, dimana seorang guru rata-rata mengajar 16 siswa, pada jenjang SLTP rata-rata 12 siswa untuk satu guru, dan rata-rata seorang guru mengajar 13 siswa pada jenjang SLTA.

4.1.2.5. Potensi Daerah

Mayoritas masyarakat memang mengakui bahwa geliat pembangunan di Kabupaten Luwu Timur terus berkembang dengan pesat, meski baru berusia 11 tahun, pembangunan sarana prasarana maupun dibidang ekonomi telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Untuk program unggulan daerah, Hatta menjelaskan sasaran pembangunan daerah diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dengan visi mewujudkan Kabupaten Agroindustri 2015. Meskipun secara umum sektor pertambangan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) senilai 71,63 persen, namun sektor ini tidak dapat dijadikan andalan daerah untuk jangka panjang karena rawannya sektor pertambangan dan penggalian ini dibidang lingkungan hidup yang berkelanjutan. Makanya, penguatan sektor pertanian menjadi fokus utama Pemkab Luwu Timur, yang 80% penduduknya bekerja di sektor ini. Konsep AgroIndustri ini disinergikan dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan berkelanjutan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Sementara untuk program Pariwisata, potensi pariwisata Kabupaten Luwu Timur sangat besar. Berdasarkan pendataan terhadap sejumlah objek wisata lokal, ada berbagai keunikan yang diyakini dapat menarik minat para wisatawan. Sebut saja Danau Matano, salah satu danau purba dengan berbagai spesies endemik didalamnya. Perbaikan sarana dan prasarana berupa pembangunan jalan dan perbaikan sarana objek wisata melalui APBD telah dilakukan. Namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan status objek wisata dari lokal menjadi regional bahkan nasional. Jarak tempuh lebih kurang 600 km dari Makassar tanpa bandara umum menjadi kendala yang cukup mempengaruhi pembangunan di sektor ini. Diperlukan sentuhan berbagai

pihak termasuk pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan kepariwisataan di Bumi Batara Guru, Kabupaten Luwu Timur.

Di sektor pertanian, ciri agraris melekat di Luwu Timur, meskipun terdapat pertambangan besar di daerah ini. pada tahun 2011 lebih dari 180 ribu ton gabah dan 21 ribu ton jagung di panen sepanjang tahun. Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Luwu Timur, atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK), menempati peringkat kedua (setelah kota Makassar) di Sulawesi Selatan. Kontribusinya terhadap PDRB propinsi Sulawesi selatan tahun sekitar 7 persen.

BPS Luwu Timur merincikan dominasi sektor pertambangan dan penggalian, dimana kontribusi sub sektor pertambangan non migas (Nikel) terhadap PDRB Luwu Timur mencapai 73,48 persen di tahun 2011. Hal ini menjadi ciri khas perekonomian Luwu Timur. Naik turunnya PDRB Luwu Timur sangat dipengaruhi besarnya nilai tambah dari Pertambangan Nikel. Namun nilai tambah dari sektor tersebut hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Sehingga PDRB Luwu Timur disajikan dalam dua versi, yaitu dengan tambang dan tanpa tambang. Bila nilai dominan tersebut tidak diikutkan, maka akan nampak kondisi riil perekonomian masyarakat. Sehingga pertanian menjadi lead sektor sekaligus menjadi ciri agraris Luwu Timur.

4.1.2.6. Visi Misi Kabupaten Luwu Timur

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah dituntut agar mampu mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri yang ditandai dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan perspektif tersebut maka Visi dan Misi harus dirumuskan agar mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan memiliki rasionalitas untuk mencapainya.

a. Visi Kabupaten Luwu Timur

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumberdaya yang ada untuk menciptakan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dicita-citakan. Adapun Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 adalah:

"KEBERLANJUTAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR MENUJU KABUPATEN AGROINDUSTRI TAHUN 2015".

Yang dimaksud **"Keberlanjutan Pemerintahan"** adalah Penyelenggaraan Pemerintahan, tahun 2011-2015 setidaknya tidaknya sama frekuensi dan mutunya dengan periode sebelumnya, bahkan seharusnya lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan **“Pembangunan”** adalah perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam semua sektor kehidupan. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen Bupati Luwu Timur untuk melakukan perubahan dari yang diperlukan selama ini belum ada (minus) menjadi ada (plus) menjadi lebih banyak jumlahnya serta makin baik kualitasnya (plus-plus).

Yang dimaksud dengan **“Pelayanan Publik”** adalah pembenahan sarana dan sumber daya pelayanan publik agar dapat menjangkau keseluruhan wilayah dan lapisan masyarakat diseluruh Kabupaten Luwu Timur. Pelayanan publik ini pada dasarnya merupakan hak dasar setiap komponen dan anggota masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang bersifat wajib. Agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih baik dari periode sebelumnya dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, akan sangat tepat jika dalam RPJMD 2011-2015 ini, mengakomodir dan mengaplikasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Yang dimaksud dengan **“Menuju Kabupaten Agroindustri Tahun 2015”**, mengindikasikan bahwa tahun 2015, Kabupaten Luwu Timur sudah harus siap menjadi daerah yang mengandalkan agroindustri sebagai lokomotif penggerak ataupun pengarusutamaan pembangunan perekonomian daerah. Pengarusutamaan agroindustri ini didukung oleh besarnya potensi wilayah dibidang pertanian, serta peluang-peluang eksternal yang mengemuka, serta

tekad untuk mempersiapkan sumberdaya yang tersedia untuk menghadapi tantangan dan hambatan pelaksanaannya.

b. Misi Kabupaten Luwu Timur

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang sebaik-baiknya;
2. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia di daerah untuk dapat menjadi handal, berdayaguna, berhasilguna untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi dalam kemajuan daerah;
3. Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar tetap harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan bermartabat dalam kesesuaian tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan agama;
4. Melanjutkan momentum dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperluas aksesibilitas dan meningkatkan daya saing daerah untuk mengantisipasi perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional, melalui industrialisasi perdesaan dan agroindustri.

4.1.3 Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai konsekuensi terbentuknya Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, agar urusan pemerintahan dapat terselenggara secara optimal.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam pengelolaan administrasi publik yang sejalan dengan otonomi daerah, Pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang

sangat penting untuk diwujudkan atas dasar tekad dan semangat yang besar dari pemerintah daerah dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah, DPPKAD Kabupaten Luwu Timur diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP), maka penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.3.1. Visi Misi DPPKAD Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan penjabaran visi dan misi kabupaten luwu timur yakni menyangkut keberlanjutan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan Menuju Kabupaten Agroindustri Tahun 2015 dan dikaitkan dengan dewasa ini bahwa daerah harus mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. maka dari itu, guna terlaksananya visi misi tersebut perlu adanya manajemen keuangan daerah yang baik, yang dimaksud yakni adanya pengelolaan keuangan daerah yang mampu membiayai semua urusan pemerintahan kabupaten luwu timur dalam hal

ini, bagaimana daerah memanfaatkan dan atau mengoptimalkan potensi-potensi daerah agar meningkatkan pendapatan daerah .DPPKAD luwu timur sebagai SKPD yang mengurus mengenai keuangan dan pendapatan daerah , mensinergiskan antara visi misi kabupaten luwu timur dengan visi misi dan strategi DPPKAD dalam optimalisasi pendapatan daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah dan visi misi kabupaten luwu timur terselenggara.

a. Visi DPPKAD kabupaten luwu timur

Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak dapat lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten.

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Yang Dinamis, Transparan dan Akuntabel”.

Makna yang terkandung dari Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut adalah agar profesionalisme dapat terwujud didalam mengelola Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategik.

b. Misi DPPKAD kabupaten Luwu Timur

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- Pertama* : Meningkatkan Pendapatan Daerah Yang Dinamis dan Berkesinambungan.
- Kedua* : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Tarnsparan dan Akuntabel.
- Ketiga* : Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

Langkah-langkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

1. Penyusunan program dan rencana kerja pada bidang pendapatan meliputi Intensifikasi dan Esktensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah serta merencanakan dan menetapkan target pendapatan yang

harus dicapai dan terealisasi yang dapat diukur, rasional dan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;

2. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi Peningkatan sarana prasarana penunjang Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan diklat keuangan;
3. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah melalui pemutahiran data aset dan penatausahaan aset daerah;
4. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh Bupati.

Visi Misi yang dijabarkan kedalam Kebijakan dan Program Instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ke depan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang lebih baik yang tidak lepas dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam **Visi Kabupaten "KEBERLANJUTAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR MENUJU KABUPATEN AGROINDUSTRI TAHUN 2015"**.

Adapun rumusan kebijakan DPPKAD yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rumusan Kebijakan DPPKAD

NO.	SASARAN	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	❖ Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Meningkatnya Dana Perimbangan Yang Diterima Daerah	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pihak Lainnya yang terkait
3.	Meningkatnya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pihak Lainnya yang terkait
4.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Apartur	Mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal
5.	Terlaksananya Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang SIKD
6.	Tersusunnya APBD dan LKPD Yang Tertib	Menigkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
7.	Tersedianya Data Aset Daerah	Mengoptimalkan Perhitungan Nilai Aset Daerah

4.1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretaris Dinas
- Bidang Pendapatan
- Bidang Anggaran
- Bidang Akuntansi
- Bidang Aset

Berdasarkan ***Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2008*** tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- a) Tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu *melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas*

pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b) Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur :

1. Perumusan Kebijakan Dinas;
2. Penyusunan rencana strategik dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
5. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

4.1.3.3. Kondisi Pegawai

DPPKAD merupakan SKPD yang mengurus urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang mengendalikan penerimaan daerah dan belanja daerah. Dengan demikian, bila memandang tugas dan fungsi DPPKAD, maka kebutuhan potensi SDM masih sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem pelayanan yang berbasis kinerja.

1. Potensi SDM DPPKAD

a. Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	-	-	-	1
2.	Golongan III	10	7	2	4	23
3.	Golongan II	4	6	8	1	19
JUMLAH		15	13	10	5	43

b. Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN			
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP
1.	Golongan IV	1	-	-	-
2.	Golongan III	2	19	-	-
3.	Golongan II	-	-	7	12
JUMLAH		5	19	7	12

c. Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A	NON ESELON	
1.	Struktural	1	4	8	30	43
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	4	8	30	43

d. Tabel 4.7 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1.	PNS	42
2.	CPNS	1
3.	PTT	2
4.	UPAH JASA	6
JUMLAH		51

e. Tabel 4.8 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PNS	21	21	42
2	CPNS	-	1	1
3	NON PNS	4	4	8
		25	26	51

4.2. Manajemen DPPKAD dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yakni sebagai berikut:

5.1.1. Manajemen DPPKAD Dalam Optimalisasi PAD di Kabupaten Luwu Timur

Dalam penelitian ini di fokuskan pada penerimaan daerah yaitu PAD. manajemen DPPKAD dalam mengelola PAD sebagai SKPD yang mengurus keuangan daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam penelitian ini ada penulis menjabarkan 4 indikator manajemen DPPKAD yaitu : *Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan PAD, Pengawasan atas Penatausahaan PAD, Evaluasi Realisasi PAD*, yang dilakukan DPPKAD selama selang waktu 2010, 2011 dan 2012

Berdasarkan keempat indikator tersebut, penulis menemukan bahwa manajemen DPPKAD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2010-2012 dalam optimalisasi PAD sudah cukup maksimal meski masih terjadi defisit pada tahun 2012. Dilihat dari target dan realiasi PAD selama tiga tahun terakhir ,PAD kabupaten luwu timur terus meningkat dan sebagian besar mencapai targe kecuali tahun 2012, itupun besar target pada tahun tersebut

jauh lebih besar dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2010, realisasi penerimaan dari PAD yaitu sebesar Rp59.148.342.602,28 dari target Rp50.437.070.480,00 dengan sisa yang melebihi target (surplus) sebesar Rp8.675.272.122,28, sementara pada tahun anggaran 2011 realisasi penerimaan dari PAD yaitu sebesar Rp64.107.042.644,16 dari target Rp61.212.444.000,00 dengan sisa yang melebihi target (surplus) sebesar Rp2.894.598.644,16, dan pada tahun anggaran 2012 realisasi penerimaan mencapai Rp98.100.075.156,43 dari target Rp100.425.012.948,00 dengan sisa target yang tidak terealisasi (defisit) sebesar Rp 2.324.937.791,57. Selisih antara target dengan realisasi PAD tidak begitu besar dalam kurun waktu 2010-2012. Terlihat bahwa hanya pada tahun 2012 PAD kabupaten luwu timur tidak mencapai target, dengan target yang mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2011 dan 2012.

5.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Faktor Pendukung, Faktor-faktor pendukung yang dimaksud dapat dilihat dari segi ketersediaan fasilitas operasional dalam pelaksanaan pemungutan PAD. Di antaranya Sumber-sumber pendapatan yang memadai dan sarana dan prasarana (fasilitas operasional) sebagai penunjang dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD khususnya bagi pelaksana teknis di lapangan (UPTD DPPKAD Kecamatan) serta kedisiplinan pegawai.

- Faktor Penghambat ,faktor-faktor penghambat yang dimaksud adalah pertama : Masih kurangnya partisipasi masyarakat terlihat dari respon masyarakat saat dilakukan penangihan dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam melaporkan objek pajaknya.kedua : SDM yang belum ditempatkan sesuai bidangnya sehingga masih terjadi lintas bidang dan juga masih adanya pegawai pemungut (UPTD) PAD yang belum memiliki komunikasi yang baik .ketiga : pertanggungjawaban dari para pengelola PAD termasuk di dalamnya UPTD dan SKPD yang kerap kali tidak maksimal serta lamban dalam melakukan pelaporan dan menyerahkan pertanggungjawabannya kepada DPPKAD sehingga terjadi kecocokan data dan target yang dicapai serta apa yang ditetapkan bisa terlihat.

5.2. Saran

1. Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat memadai seyogyanya pemerintah daerah melalui DPPKADnya mampu untuk mengelola dengan baik sumber daya alam tersebut sehingga menjadi sumber PAD yang potensial dan berdampak pada meningkatnya PAD . Oleh karena itu, DPPKAD harus merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengintensifikasi sumber-sumber PAD yang ditetapkan dan melakukan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah dengan meningkatkan akurasi data

lapangan.dengan catatan sumber-sumber PAD baru tersebut harus di optimalkan dan tidak memberatkan masyarakat.

2. Kabupaten Luwu Timur sangat kaya akan SDA. Ini berarti sangat berpotensi untuk mengoptimalkannya dan meningkatkan PAD. Namun, SDA tanpa didukung dengan SDM yang memadai tidak akan memberikan kontribusi yang baik dalam upaya peningkatan PAD. Untuk itu, DPPKAD masih perlu untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan termasuk juga para pegawai UPTD karena merekalah yang langsung berhadapan dengan masyarakat serta DPPKAD segera mengisi eselon IV yang masih belum terisi.
3. Kecocokan dan Akurasi data tentang sumber-sumber PAD serta target tahun sebelumnya sangat penting dalam menargetkan PAD disetiap anggaran ,sehinggat tidak terjadi defisit PAD meski telah di lakukan perubahan anggaran.Maka,DPPKAD ,SKPD pengelola PAD dan UPTD harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik.
4. Pemerintah kabupaten luwu timur melalui DPPKAD senantiasa melakukan sosialisasi peraturan daerah baik itu pajak maupun retribusi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat terhadap kewajibannya dan penegakan aturan terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Mardiasmo,2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Darise,N.,2009.*Pengelolaan Keuangan Pada SKPD dan BLU*.Jakarta:Indeks Jakarta

Soekamto, S., 1982.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Rajawali Press.

Silalahi,Uber.2011.*Asas-Asas Manajemen*.Bandung:PT Refika Aditama

Halim,Abdul. dan Mujib,Ibnu.2009.*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*.Yogyakarta:Sekolah Pascasarjana UGM

Syafiie,Inu Kencan.2011.*Manajemen Pemerintahan*.Bandung:Pustaka Reka Cipta.

Bungin Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Fajar Interpratama Offset

Rahayu,Ani Sri.2010.*Pengantar Kebijakan Fiskal*.Jakarta:Bumi Aksara

Tim Redaksi Fokus Media.2007.*Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*.Bandung:Fokus Media.

-----,2010.*Pemerintah Daerah dan organisasi Perangkat Daerah*.Bandung : FokusindonMandiri.

Tim Prima Pena,2006.*Kamus Ilmiah Populer*.Surabaya:Gitamedia Press.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

undang-undang No. 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten luwu timur

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD kabupatten Luwu Timur

DATA ONLINE :

<http://pomphy.blogspot.com/2008/11/hubungan-antara-uu-322004-uu-332004.html> (diakses pada 20 september 2013).

<http://marsono64.blogspot.com/2009/02/pengelolaan-keuangan-daerah-pasca.html> (diakses pada 20 September 2013).

http://ryandizahdomo.blogspot.com/2012_10_01_archive.html (diakses pada 23 September 2013)

